

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1993, di Kota Makassar terjadi unjuk rasa oleh kalangan mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampus di Kota Makassar di depan gedung DPRD Tkt. I Sulsel yang menamakan dirinya aliansi anti SDSB. Unjuk rasa itu terjadi karena mereka menganggap SDSB merupakan bentuk Judi dan hanya menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mereka menuntut agar DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapuskan SDSB di Indonesia dan mendesak gubernur mencabut izin surat pengedaran SDSB di wilayah Sulawesi Selatan.¹

Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) merupakan salah satu jenis kupon undian yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan sumbangan untuk tujuan pembangunan olahraga. Sebelum SDSB, kupon dengan bentuk lain sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB) dan Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola yang kemudian berganti nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB).²

¹ “Lagi pengunjuk rasa menantang SDSB datangi DPRD Sulsel”. *Pedoman Rakyat* 20 November 1993.



Wahyu Lumaksono, Anik Andayani. “Legalisasi Porkas dan Dampaknya masyarakat pada tahun 1985-1987”. *Avatara: e-Journal Pendidikan* Vol.2 No. 3. 2014. hlm. 541.

Awal kegelisahan yang memicu terjadinya unjuk rasa oleh mahasiswa dimakassar berawal dari berbagai kasus yang diangkat kepermukaan oleh media massa sejak penyelenggaraan Sumbangan dengan bentuk kupon undian tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada Ambo Tang, seorang karyawan Kodim Tabes 1408 Ujung Pandang. Dia menyatakan bahwa empat orang anaknya tak bisa lagi dibendung untuk tidak membeli kupon porkas. Kasus lain juga diungkapkan oleh seorang guru sekolah SMTP di Ujung Pandang. Ada beberapa orang muridnya menggunakan uang yang diberikan orang tuanya yang harusnya digunakan untuk bayar uang sekolah tapi malah digunakan untuk membeli kupon Porkas. Baik Ambo Tang maupun guru SMTP itu menghimbau pemerintah khususnya Menteri Sosial agar segera menghentikan Porkas.³

Pada tahun 1979 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang kemudian disebut dengan kupon TSSB dan dikelola oleh Yayasan Dana Bhakti Sosial Berhadiah (YDBKS) dengan berlandaskan pada UU RI No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian. Pemerintah menganggap bahwa kupon ini bersifat sumbangan bukan kartu lotere atau judi. Pemerintah juga menegaskan bahwa kupon ini bertujuan untuk menghimpun dana agar dapat menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga yang berarti menunjang dana KONI untuk pembiayaan



‘Hentikan Porkas di UP’. *Pedoman Rakyat*. 25 Juli 1986.

olahraga bukan lagi dengan tujuan pembangunan.⁴ Kupon TSSB berjalan selama 9 tahun mulai 1979 hingga tahun 1988 dan kemudian di gantikan dengan kupon SDSB.

Selain TSSB, terdapat beberapa sumbangan untuk membantu pengembangan prestasi olahraga yang berbentuk kupon saat itu seperti kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola yang mulai beredar sejak tahun 1985 dan kemudian berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) sesuai Surat keputusan Menteri Sosial nomor 29/BSS 1987.⁵ Sama halnya dengan TSSB, KSOB kemudian menimbulkan keresahan terhadap masyarakat karena dianggap bahwa merupakan bentuk perjudian. Timbul berbagai kasus yang diangkat ke permukaan oleh media massa. Muncul masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas karena beratnya tekanan sosial, ekonomi dan psikologi yang ditanggung oleh kelas masyarakat berpenghasilan rendah akibat kecanduan TSSB dan KSOB.⁶

Hingga pada tahun 1988, terbit Surat Keputusan Menteri Sosial republik indonesia tentang pemberian ijin penyelenggaraan pengumpulan SDSB dan

⁴ Felix Nathaniel. *Orde Baru adalah Rezim Penyelenggara Judi*. <https://tirto.id/orde-baru-adalah-rezim-penyelenggara-judi-gxJi>. (di akses pada 25 Mei 2024, pukul 19:27 WITA).

⁵ Wahyu Lumaksono, Anik Andayani. *Legalisasi Porkas dan Dampaknya....* hlm. 543.



⁶ Wita Puspitasari. "Mengatasi masalah sosial dengan kebijakan simbolik". Kelompok Studi Indonesia, *Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Studi Indonesia, 1989). hlm. 114.

kemudian di susul dengan surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan SDSB untuk menggantikan KSOB dan TSSB yang sudah di legalkan sebelumnya.⁷ Untuk menjawab keresahan yang ada pada masyarakat, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa peredaran SDSB di daerah-daerah di serahkan ke Gubernur masing-masing dan boleh saja tidak menyelenggarakannya.⁸

Undian baru ini dianggap tidak berbahaya karena diperuntukkan hanya bagi para dermawan, yang membeli kupon dengan maksud untuk menyumbangkan uang bukan mengharapkan hadiah. Harga kupon SDSB juga dinaikkan agar tidak terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Kupon SDSB juga bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai dana kesejahteraan dan Olahraga karena kurangnya alokasi dana dari APBN. Alasan lain yaitu untuk mencegah adanya judi ilegal di Masyarakat.⁹

Makassar juga menyelenggarakan program tersebut sesuai dengan instruksi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Hal itu dapat dilihat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 1631/XII/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang pelaksanaan salah satu jenis kupon undian

⁷ Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. BSS. 20-9/89 tentang pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dermawan sosial berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta.” (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,2015). No. Reg. 587

⁸ “Setelah KSOB dan TSSB dihapus diganti SDSB”. *Bali Post*. 23 November

Wita Puspitasari. *Mengatasi masalah.....* Hlm. 115-116.



yakni SDSB di wilayah Sulawesi Selatan. Surat tersebut kemudian di instruksikan kepada masing-masing Kepala Daerah salah satunya Kota Makassar.¹⁰

Penyelenggaraan kupon undian ini kemudian menimbulkan dampak seperti yang telah di jelaskan di awal. Perjudian di Makassar memiliki dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh kupon sumbangan semakin tidak terarah lagi di Makassar yang menyebabkan perubahan sikap moral dan mental pada masyarakat. Dampak lain dari adanya kupon sumbangan ini adalah masalah ekonomi pada masyarakat. Semakin banyak orang yang tidak memperhatikan perekonomian keluarga karena pengaruh judi. Mereka yang telah kecanduan akan judi lebih memilih untuk membeli kupon undian dari pada membeli kebutuhan dapur dan kebutuhan pendidikan anak. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa dengan membeli kupon undian akan selalu mendapatkan untung yang besar.¹¹

Melihat dampak Undian yang merugikan masyarakat dan merusak moral generasi muda yang kecanduan, timbul reaksi penolakan terhadap SDSB karena dianggap merupakan bentuk perjudian. Aksi demonstrasi yang dilakukan

¹⁰ Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Surat Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan tentang instruksi atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pengedaran BSDSB, kepada kepala daerah tingkat II se-Sulawesi Selatan". (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 245.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 34.



mahasiswa dan masyarakat secara terus menerus dan merebak kemana-mana membuat pemerintah akhirnya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Mensos RI NO. BSS 30-9/93 tanggal 9 September 1993 yang memberikan izin berlakunya dalam tahun 1994 dan keputusan Mensos NO. BSS 24-10/92 tentang pemberian izin SDSB tahun 1993 yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 1993, tapi sudah tidak lagi menjual dan mengedarkan SDSB sejak tanggal 24 November 1993.¹²

Dari penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dikarenakan timbul pertanyaan mengapa masyarakat tertarik untuk membeli kupon undian tersebut . Kemudian bagaimana dampak legalisasinya terhadap masyarakat di kota Makassar dan mengapa muncul reaksi penolakan terhadap penyelenggaraan kupon undian oleh masyarakat Kota Makassar.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Mengapa penduduk perkotaan tertarik untuk membeli kupon undian di Kota Makassar?
- 1.2.2. Bagaimana dampak penyelenggaraan kupon terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Makassar ?
- 1.2.3. Mengapa muncul reaksi penolakan terhadap penyelenggaraan kupon undian di Kota Makassar ?

1.3. Batasan Masalah



“Mensos Cabut Izin SDSB”. *Harian Ekonomi Neraca*. 26 November

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pembatasan agar pembahasan hanya berfokus pada batasan yang telah ditentukan, sehingga tulisan mendapatkan inti pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan masalah dalam penelitian sejarah sendiri terbagi atas dua yakni batasan spasial dan temporal.

1.3.1. Batasan Spasial

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan spasial pada suatu daerah yakni daerah Makassar. Batasan spasial dalam penelitian ini mencakup penyelenggaraan kupon sumbangan yang ada di Kota Makassar. Peneliti mengambil Kota Makassar sebagai wilayah penelitian karena Kota Makassar merupakan Kota yang mendukung dan menyelenggarakan Undian Kupon TSSB, KSOB dan SDSB.

1.3.2. Batasan Temporal

Batasan temporal sendiri penulis memilih antara tahun 1979-1993. Tahun 1979 menjadi batasan awal karena pada tahun itu muncul kebijakan kupon dengan bentuk sumbangan berhadiah yang di kelola oleh YDBKS mulai dari TSSB sampai SDSB yang mulai berjalan tahun 1979 sampai di hentikan pada tahun 1993.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kota Makassar mau membeli Kupon sumbangan tersebut.



1.4.2. Untuk melihat dampak penyelenggaraan kupon sumbangan terhadap kehidupan Sosial masyarakat Kota Makassar.

1.4.3. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kota Makassar melakukan penolakan terhadap Kupon Sumbangan

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis Judi legal yang ada di Kota Makassar dalam rentang waktu tahun 1979-1993.

1.5.2. Dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana dampak atau pengaruh penyelenggaraan kupon sumbangan terhadap kondisi Sosial masyarakat.

1.5.3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi dalam penelitian selanjutnya serta memberi kontribusi pada perkembangan penelitian ilmu sejarah.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Seperti yang telah terjelaskan pada bagian latar belakang bahwa perjudian telah lama dilakukan oleh masyarakat indonesia dengan segala jenis-jenisnya mulai dari yang dilakukan secara ilegal sampai adanya upaya legalisasi oleh pemerintah sendiri. Karena hal tersebut, tentunya telah banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, sehingga sudah ada penulisan yang relevan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti.



Dalam penulisan ini menggunakan beberapa jenis buku dan tulisan untuk digunakan sebagai bahan rujukan untuk menunjang penyusunan

penulisan ini. Buku pertama yaitu buku dari Haryanto *Indonesia Negeri Judi?*.¹³ Buku ini digunakan untuk melihat bagaimana sejarah perkembangan perjudian di Indonesia pada umumnya, sistem perundang-undangan, dan pandangan masyarakat tentang perjudian. Dalam buku ini memuat dua pandangan masyarakat tentang perjudian. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang haram sehingga harus di jauhi, dan ada juga yang membolehkannya sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sosial. Buku ini dapat membantu penulis untuk melihat bagaimana dampak legalisasi perjudian secara umum agar penulis dapat melihat dampaknya terhadap masyarakat Kota Makassar.

Buku kedua adalah *Gerakan Politik Indonesia: Catatan 1993*.¹⁴ Buku ini mengkaji peristiwa politik di Indonesia pada tahun 1993. Salah satu pembahasan di dalamnya adalah unjuk rasa tentang SDSB yang menurut demonstran, SDSB dianggap pembodohan bagi masyarakat kecil. Karena itu, muncul gagasan dari mahasiswa untuk melakukan gerakan tolak SDSB agar di hapuskan. Unjuk rasa ini dilakukan oleh gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia dan masyarakat yang menolak adanya SDSB. Buku ini membantu penulis untuk melihat gerakan aksi menolak SDSB secara Nasional dan menjadi pemicu gerakan aksi demonstrasi masyarakat di Kota Makassar.

¹³ Haryanto. *Indonesia, Negeri Judi?*. (Jakarta Timur: Yayasan Khasanah Mandiri, 2003).

Sunardian Wirodono. *Gerakan Politik Indonesia: Catatan 1993*. (Jakarta: WARA dan IKAPI, 1994).



Buku terakhir yaitu Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda mengenai Demokrasi di Indonesia.¹⁵ Buku ini berisi kumpulan tulisan ilmiah yang salah satu tulisannya membahas tentang perjudian legal jenis KSOB dan TSSB. TSSB dan KSOB memperlihatkan tekanan sosial, ekonomi dan psikologi yang dialami oleh masyarakat kecil akibat demam KSOB dan TSSB. Besarnya kerugian dari masyarakat membuat pemerintah menghapus KSOB dan TSSB dan digantikan dengan SDSB. Dimana, SDSB ditujukan bagi para dermawan dengan maksud untuk menyumbangkan uang, bukan mengharap hadiah. Untuk mengurangi dampak negatif, pemerintah memberi keringanan izin pencedaran kupon SDSB di serahkan ke Gubernur di wilayah masing-masing. Penulis menggunakan buku ini untuk melihat proses pelaksanaan undian jenis TSSB dan KSOB hingga digantikan oleh SDSB sehingga dapat membantu penulis bagaimana pelaksanaannya di Kota Makassar.

Dalam hal tulisan ilmiah penulis merujuk pada jurnal Wahyu Lumaksono dan Anik Andayani yang berjudul Legalisasi Porkas dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987.¹⁶ Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan undian porkas yang kemudian berubah nama menjadi KSOB. Tulisan ini hanya membahas salah satu jenis kupon undian legal

¹⁵ Wita Puspitasari. *Mengatasi masalah.....* Hlm. 114.



Wahyu Lumaksono, Anik Andayani. "Legalisasi Porkas dan Dampaknya masyarakat pada tahun 1985-1987". *Avatara: e-Journal Pendidikan Vol.2 No. 3. 2014.*

yaitu KSOB. Di sisi lain, tulisan ini dapat membantu penulis untuk melihat dampaknya secara umum di Indonesia sehingga dapat menjadi data pembandingan untuk wilayah Kota Makassar.

Selain itu penulis juga menggunakan jurnal ilmiah yang berjudul *Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi sebagai dongkrak Perekonomian Indonesia tahun 1960-1994*.¹⁷ Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana perkembangan perjudian di Indonesia mulai tahun 1960-1994 yang bentuknya selalu berubah ubah. Penulis merujuk pada tulisan ini karena tulisan ini menggambarkan perjudian di Indonesia secara umum sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan perbandingan tentang pelaksanaan perjudian legal di daerah-daerah khususnya Kota Makassar.

1.6.2. Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini memiliki judul *Pengaruh Legalisasi Perjudian di Kota Makassar tahun 1979-1993*. Pertama kita harus mengetahui apa itu judi?. Secara Sosiologis Kartini Kartono mengatakan bahwa Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.¹⁸ Selain itu dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang

¹⁷ Nayla Zulfia, Dinda Ayu Fitriani, Miftah Uswatun Hasanah, Riki Irawan. "Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi sebagai dongkrak perekonomian Indonesia tahun 1960-1994". *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Kartini Kartono. *Patologi.....* hlm. 58.



penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.¹⁹

Legalisasi mengacu pada proses pengakuan atau validasi hukum terhadap suatu dokumen, tindakan, atau kegiatan. Legalisasi merupakan proses yang memungkinkan suatu kegiatan atau transaksi untuk diakui secara resmi dan sah oleh pemerintah. Dengan adanya legalisasi, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas serta dapat menjalankan kegiatan dengan aman dan terjamin. Secara moral, legalisasi dapat menimbulkan pertanyaan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hukum. Legalisasi sesuatu dapat menciptakan perubahan budaya dan norma dalam masyarakat. Itulah yang terjadi pada kasus legalisasi perjudian yang dilakukan pemerintah indonesia. Setiap kebijakan legalisasi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan implikasi moral dan sosial yang mungkin terjadi.²⁰

¹⁹ Penjelasan umum UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.



JWS. *Legalisasi adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*. [Legalisasi Pengertian, Jenis, Dan Manfaatnya \(legalizationproject.id\)](http://legalizationproject.id). (diakses pada 024, pukul 22:09 WITA).

Perjudian memiliki sifat untung-untungan yang artinya untuk memenangkan pertandingan atau perlombaan hanya bergantung pada keberuntungan. Faktor keberuntungan biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan atau kepintaran yang sudah terbiasa atau terlatih. Dalam permainan tersebut ada taruhan yang dipasang oleh pemain baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. adanya taruhan menentukan bahwa akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Hal itulah yang menentukan suatu permainan apakah judi atau bukan.²¹

Pada kupon undian TSSB dan SDSB, cara mainnya hampir mirip. Kupon-kupon ini berisikan nomor-nomor yang kemudian dicetak dengan jumlah tertentu lalu dipasarkan ke masyarakat. Pemasarannya menggunakan agen-agen resmi yang telah di tunjuk oleh pihak pengelola. Masyarakat kemudian membeli kupon tersebut dengan harapan nomor yang dibeli akan menjadi pemenang dan mendapat sejumlah hadiah yang sudah di tentukan sebelumnya. Pengumumannya dilakukan setiap minggu melalui agen-agen resmi tersebut.²² Berbeda dengan kupon undian Porkas atau KSOB. Kupon ini berisi jadwal pertandingan sepak bola. Masyarakat kemudian membeli kupon tersebut dan akan menebak hasil pertandingan sepak bola tersebut. ketika hasil

²¹ Haryanto. *Indonesia,.....* Hlm. 7.

M Rizal. *Dari Lotre Sampai SDSB.* <https://news.detik.com/x/detail/20220708/Dari-Lotre-Sampai-SDSB/>. (di akses pada 4 Juni 2024, pukul 10.00 WIB).



tebakannya benar maka akan mendapat hadiah sesuai nilai yang telah ditetapkan.

Melihat cara main kupon TSSB, KSOB dan SDSB, bisa dikatakan bahwa terdapat unsur-unsur perjudian di dalamnya. Masyarakat membeli kupon-kupon tersebut dengan mempertaruhkan uang mereka dan berharap nomor-nomor yang mereka beli akan keluar dan menjadi pemenang. Ketika nomor yang diumumkan sesuai dengan nomor yang mereka beli maka akan diberi hadiah yang nilainya sudah ditentukan sebelumnya. Tapi, ketika nomor yang keluar tidak sesuai maka uang yang mereka pertaruhkan untuk membeli kupon undian akan hangus.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan berfokus pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait legalisasi perjudian yang memiliki dampak terhadap masyarakat indonesia, khususnya Kota Makassar. Adanya kebijakan pemerintah tentu akan berdampak pada masyarakat selaku pelaksana atau yang menerima kebijakan. Masyarakat merupakan objek dari ilmu sosial, oleh karena itu penulis akan menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam penelitian ini. Secara khusus, penulis akan melihat bagaimana dampak sosial legalisasi perjudian di Kota Makassar.

1.7. Metode Penelitian

Secara ilmiah metode merupakan cara atau langkah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, dalam hal pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengetahui,



memecahkan, dan memahami suatu objek penelitian.²³ Penulisan penelitian sejarah terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Begitupun dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan metode sejarah agar tercipta hasil karya tulisan sejarah yang saling berhubungan satu sama lain.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam penelitian sejarah ini Pertama, *Pengumpulan Sumber* yaitu tahap mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Sumber-sumber yang dikumpulkan berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber berdasarkan bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis.²⁴ Maka, dalam proses pengumpulan data ini penulis akan melakukan pengumpulan sumber-sumber primer berupa arsip seperti arsip SK penyelenggaraan TSSB, KSOB dan SDSB hingga arsip SK Penertibannya yang dapat diperoleh dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan dan sumber berupa berita tentang penyelenggaraan TSSB, KSOB, dan SDSB pada Surat kabar. Kemudian, mengumpulkan sumber sekunder, berupa buku yang relevan dan bisa menjadi bahan rujukan penulis yang dapat diperoleh dari Perpustakaan. Selain itu penulis Juga akan mengumpulkan sumber-sumber lisan yang akan didapatkan dari proses wawancara dengan orang-orang yang menjadi



²³ Yoga Winando. *Metode Penelitian*. [Metode Penelitian Adalah - Pengertian, Jenis, Tujuan \(gurupendidikan.co.id\)](http://gurupendidikan.co.id). (diakses pada 6 Juni 2023, pukul TA).

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018).

saksi maupun pelaku sejarah. Adapun yang akan menjadi narasumber peneliti yaitu orang-orang yang terlibat pada penyelenggaraan TSSB, KSOB dan SDSB seperti para agen-agen penjualan kupon undian, orang-orang yang pernah membeli hingga mengalami kecanduan kupon-kupon tersebut.

Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, tahap memilah dan menyaring keabsahan sumber-sumber yang telah ditemukan. Kritik sumber terbagi menjadi dua bagian yang pertama kritik eksternal dan yang kedua kritik internal. Penulis akan memulai dengan proses eksternal untuk mengetahui kredibilitas sumber yang ditemukan baik itu huruf dalam naskah, tanda tangan bahkan sampai pada kelengkapan sumber agar kiranya semua itu sesuai dengan masanya. Lalu, melakukan kritik intern, yang lebih spesifik pada isi dari sumber untuk menyesuaikan kesamaan isi sumber dengan penelitian yang dilakukan, agar dapat mengetahui kredibilitas hubungan sumber dengan penelitian. Kritik juga dilakukan pada sumber lisan dengan melihat kategori narasumber berdasarkan usia, kondisi sosial, serta hal lain yang sesuai dengan zaman penelitian.²⁵

Tahapan selanjutnya Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya agar bisa lebih dekat dengan fakta sejarah. Pada tahapan ini penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh



Kuntowijoyo. *Pengantar.....* hlm. 77-78

selama penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian sehingga dapat membentuk suatu peristiwa yang saling berkaitan.²⁶

Penulisan merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis akan menyajikan hasil temuannya dari tiga tahap sebelumnya dengan cara menyusun dan merangkai fakta-fakta berdasarkan sumber sejarah yang telah ditemukan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan aspek kronologis. Dalam penulisan harus menggunakan bahasa yang sederhana dan memiliki batasan-batasan yang jelas agar mudah untuk dipahami oleh pembaca.²⁷

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang kondisi sosial masyarakat Kota Makassar Pada 1979-1993. Bab ini berisikan pembahasan mengenai kondisi masyarakat dari segi sosial dan budaya.

BAB III akan membahas tentang alasan legalisasi perjudian di indonesia, kemudian alasan penyelenggaraannya di Kota Makassar. Poin selanjutnya akan menjelaskan jenis-jenis perjudian legal yang diselenggarakan



Kuntowijoyo. *Pengantar*..... hlm. 78-80

Kuntowijoyo. *Pengantar*..... hlm. 80-81

di Kota Makassar hingga tanggapan masyarakat pada awal penyelenggaraan kupon sumbangan ini.

BAB IV akan membahas tentang dampak dari legalisasi perjudian di Kota Makassar baik positif maupun negatif. Pembahasannya meliputi dampak sosial dan budaya legalisasi judi terhadap masyarakat Kota Makassar. Poin kedua yaitu membahas tentang upaya pemerintah Kota Makassar mengantisipasi dampak legalisasi perjudian terhadap Masyarakat. Poin ketiga akan membahas tentang proses penolakan masyarakat Kota Makassar terhadap judi legal hingga penyelenggaraannya di hentikan.

BAB V adalah bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat dan jelas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah sesuai yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

2.1. Kondisi Geografis kota Makassar

Pada masa pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru, Kota Makassar mengalami perkembangan geografis yang cukup signifikan, baik dari sisi tata ruang maupun perluasan wilayah administratif. Secara geografis, Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap langsung ke Selat Makassar, dan memiliki pelabuhan strategis yang telah menjadi penghubung penting antara kawasan timur dan barat Indonesia sejak masa kolonial. Kota Makassar berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, Kabupaten Gowa di sebelah Selatan serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di sebelah barat dan utara.²⁸

Pada tahun 1959, Kota Makassar ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kotapraja melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965, statusnya diubah menjadi Kotamadya Makassar. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menata ulang struktur administratif kota seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah.²⁹

²⁸ Citra Kota Makassar Dalam Arsip. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia).



Rismawidiawati. "Makassar: Dari Kotapraja ke Kotamadya (1959-
[https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/makassar-dari-kotapraja-
adya-1959-1971-rismawidiawati/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/makassar-dari-kotapraja-adya-1959-1971-rismawidiawati/)). (diakses pada 22 Februari 2025 pukul
TA).

Pada masa di bawah kepemimpinan Walikota H.M. Dg. Patompo, Makassar mengalami pembangunan fisik yang signifikan. Program "Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar 1965–1970" atau yang dikenal dengan Program 3K (kemiskinan, kemelantaran, dan kebodohan) diluncurkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung memengaruhi struktur geografis kota dengan mendorong ekspansi ke wilayah timur dan utara.³⁰

Atas beberapa faktor, Kota Makassar kemudian mengalami perluasan hingga mencapai 215 KM Persegi yang sebelumnya hanya 21 KM Persegi berdasarkan P.P. No. 51 Tahun 1971. Perluasan Kota Makassar tersebut dengan mengambil beberapa wilayah dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar seperti Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan. Dalam surat tersebut juga mencakup perubahan nama dari Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang sebagai bentuk dari keinginan rakyat dan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang sendiri.³¹



H. M. Dg. Patompo. “*Menyingkap Tabir Kegelapan*”. (Ujung Pandang: in SMP FRATER Ujung Pandang, 1976). Hlm, 27.

H. M. Dg. Patompo. *Menyingkap Tabir*..... hlm. 31.



Gambar 2.1 Peta Kotamadya Ujung Pandang Setelah diperluas.
 Sumber: Buku. Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi Pembangunan).



erluasan wilayah ini menjadi titik penting perkembangan Kota Makassar

1. Perluasan ini tidak hanya berdampak pada perubahan administratif, tapi

juga berdampak pada perkembangan pembangunan sarana dan prasarana. Dasar utama pembangunan Kota Makassar adalah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi perkembangan fisik dan aspek mental spiritual baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.³² Pembangunan sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana transportasi, hiburan, rekreasi, pariwisata, dan olahraga baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Pembangunan pada bidang hiburan dan rekreasi dapat dilihat pada Pulau Kayangan yang terletak di depan Kota Makassar dan menjadi tempat rekreasi favorit warga kota. Pulau Kayangan, selain memiliki panorama laut yang indah, setiap malam minggu diadakan pertunjukan musik, seni budaya, permainan ketangkasan, serta pasar malam. Salah satu kegiatan rutin yang menarik minat pengunjung adalah pemilihan Ratu Pantai Kayangan.³³ Permainan yang memiliki unsur judi seperti bertaruh menggunakan uang dan kemudian jika menang akan mendapatkan hadiah dalam bentuk lain seperti makanan, minuman dll.³⁴ Selain pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah kota juga merancang kegiatan tahunan seperti pekan hiburan dan pameran pembangunan yang mendapat perhatian besar dari masyarakat kota. Sebelum 1970, kegiatan semacam ini sudah pernah dilakukan beberapa kali.



³² H. M. Dg. Patompo. “*Menyingkap Tabir.....*” hlm. 27.

Ilham. “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar sa Orde Baru”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4 No. 1. 2019. Hlm. 20.

Wawancara: Deddy Liongady, Makassar, 10 Mei 2025.

Tempat rekreasi dan hiburan terbesar dalam kota adalah Taman Hiburan Rakyat (THR) Makassar yang dibangun pada tahun 1966 dan menjadi tempat hiburan hingga tahun 1975. Berbeda dari tempat wisata lain yang hanya bisa dinikmati kalangan berduit, tempat ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. THR dibangun dengan tujuan untuk menyediakan sarana hiburan yang sehat dan murah. Sarana hiburan dianggap mampu menciptakan ketentraman dan kesenangan bagi penduduk kota.³⁵

Seiring perkembangannya, Kota Makassar terbagi menjadi kota lama sebagai Kawasan perdagangan, Kawasan Panakkukang atau *Panakkukang Garden City* sebagai Kawasan perkantoran dan pemukiman, Kawasan Biringkanaya Timur sebagai Kawasan Pendidikan, dan Kawasan Biringkanaya Utara sebagai Kawasan industri. Daerah Mariso, dan pulau-pulau di sekitar Selat Makassar sebagai Kawasan pariwisata. Kawasan pertanian menjadi pemukiman, pertokoan dan perkantoran, tambak dan rawa menjadi bangunan industry.³⁶

Pada akhir masa jabatan Walikota Patompo, Makassar telah berubah menjadi kota yang memiliki fasilitas modern. Segala sarana yang merupakan kebutuhan masyarakat kota telah dibangun. Fasilitas perkantoran, pasar dan pusat bisnis, sarana pendidikan, kesehatan, sarana sosial, rekreasi, hiburan, dan lain-lain telah dibangun. Berbagai bentuk kegiatan untuk menunjang kebutuhan masyarakat kota modern juga

³⁵ Ilham. “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar sa Orde Baru”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4 No. 1. 2019. Hlm. 20.

Juhana Said. “ Perubahan Fungsi Lansekap terhadap Peningkatan ur Udara di Lingkungan Kota Makassar”. *Jurnal Arsitektur, Kota dan nan (LOSARI)*. Hlm. 18-19.



dilakukan. Pemerintah kota menganggap bahwa mental masyarakat akan terbangun dengan sendirinya mengikuti kemajuan-kemajuan pembanguna fisik perkotaan.³⁷

2.2. Kondisi Demografi Kota Makassar

Kota Makassar mengalami dinamika demografi yang cukup signifikan, seiring dengan perannya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Indonesia Timur. Pada awal 1950-an, penduduk Makassar masih relatif terkonsentrasi di wilayah inti kota, namun laju urbanisasi mulai meningkat tajam seiring masuknya arus migrasi dari daerah-daerah pedalaman Sulawesi dan kawasan timur lainnya. Pertumbuhan penduduk ini dipicu oleh konsolidasi pemerintahan serta pemulihan ekonomi pasca-perang yang menjadikan kota ini sebagai magnet baru bagi pencari kerja dan pelaku usaha. Memasuki masa Orde Baru, pemerintah pusat mulai mendorong modernisasi kota melalui program pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman, yang berdampak pada ekspansi wilayah perkotaan dan perubahan struktur sosial penduduknya.³⁸

2.2.1. Jumlah Penduduk Kota Makassar

Perkembangan Kota Makassar sebagai Pusat kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi yang terus meningkat. Arus urbanisasi ini terbagi dalam dua gelombang, gelombang pertama di antara tahun 1945-1950 kemudian gelombang kedua diantara 1950-1960-an. Arus gelombang pertama merupakan refleksi pentingnya posisi sosial politik Kota Makassar di daerah



Ilham. Penyeragaman..... Hlm. 21.

M. R. Rasyid. *“Kota Makassar dalam Perspektif Sejarah Perkotaan”*.
ur: Pustaka Refleksi, 1995). Hlm, 47-49.

Indonesia bagian timur. Arus kedua untuk menghindari ketidakamanan dan ketidakpastian di daerah pedesaan Sulawesi Selatan bersamaan dengan meluasnya operasi militer, baik oleh TNI maupun oleh gerombolan.³⁹

Dalam laporan walikota H.M Daeng Patompo, penduduk Kota Makassar tahun 1966 adalah 424.143 jiwa dan empat tahun kemudian, tahun 1970 bertambah menjadi 432.240 jiwa. Pada tahun 1985 jumlah penduduk Kota Makassar telah mencapai 778.593 jiwa berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.⁴⁰ Sampai pada tahun 1991, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 944.372 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdiri atas usia anak-anak sebanyak 310.090 jiwa dan usia dewasa sebanyak 643.282 jiwa.⁴¹

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Kota Makassar
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar

No	Jumlah Penduduk Kota Makassar (Jiwa)
1979	623.985
1980	708.465
1981	712.224
1983	736.159
1984	748.611
1985	753.362

³⁹ Dias Pradadimara. "Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses "Etnisasi" Sebuah Kota". *Universitas Gajah Mada: Jurnal Populasi*, Vol. 14 No. 1. 2003. Hlm. 86



Anwar Arifin. "Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966". (Tangerang Pustaka Irvan, 2019). Hlm. 33.

Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar". (Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2010). Hlm. 34.

1986	778.581
1987	806.129
1988	821.957
1989	822.013
1990	944.372
1991	971.947
1992	1.000.328
1993	1.019.948

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar yang pada umumnya berada di kawasan pantai mengakibatkan tingginya permintaan akan tempat tinggal dan fasilitas lainnya yang menunjang kebutuhan hidup. Peningkatan jumlah penduduk ini diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah kedatangan para pedagang, pengusaha, dan kaum cendekiawan di kota tersebut, perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari kerja, adanya penduduk desa yang ingin menuntut ilmu dikota dan sebagainya.⁴²

2.2.1.1. Berdasarkan Etnis

Hingga tahun 1950-an masyarakat Kota Makassar, masih di diami oleh masyarakat yang heterogen atau berasal dari berbagai kelompok etnis. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya arus urbanisasi yang masuk ke Kota Makassar. Mereka yang masuk berasal dari perantauan daerah yang termasuk dalam provinsi Sulawesi Selatan seperti Mandar, Toraja, dan orang-orang Massenreng Pulu dan juga



Nur Jannah Jamal. *“Perumahan Rakyat Kota Makassar 1927-1974”*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016). Hlm, 28.

perantauan dari luar Sulawesi Selatan seperti Suku Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon (orang Maluku), Timor, Madura, Tanimbar, Buton, Cina, India, dan Arab.⁴³

Berdasarkan hasil survei di satu permukiman di Tengah kota pada tahun 1951-1952, hanya 35 persen warga setempat yang lahir di Kota Makassar, 31 persen lahir di daerah Indonesia bagian timur, sedangkan 18 persen lahir di luar Kota Makassar tepatnya di daerah lain di dalam wilayah Sulawesi Selatan. Hanya 6 persen dari keseluruhan warga permukiman itu lahir di Jawa dan 0,5 persen kelahiran Cina atau merupakan etnis Tionghoa.⁴⁴

Kemudian pada tahun 1972, Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti Universitas Hasanuddin, diketahui bahwa penduduk Kota Makassar yang lahir di kota ini tidak mencapai separuh dari total penduduk tepatnya hanya 42,6 persen. Di masa itu lebih banyak penduduk kota yang lahir di daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama di daerah yang berbahasa Bugis, daripada yang lahir di dalam kota. Hampir 30 persen penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis, dan 12,4 persen lahir di daerah berbahasa Makassar di luar kota. 6 persen penduduk lahir di daerah berbahasa Toraja dan Mandar, 9 persen lahir di daerah di luar Sulawesi Selatan.⁴⁵

Adanya keberagaman ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan struktur sosial dan budaya masyarakat kota. Dibeberapa Kawasan, masyarakat hidup

⁴³ Mukhlis Paeni. “*Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*”. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984/1985). Hlm. 87.



Dias Pradadimara. *Dari Makassar.....* Hlm. 86-87.

Dias Pradadimara. *Dari Makassar.....* Hlm. 87-88.

berdampingan dengan latar belakang etnis yang berbeda tetapi tetap menunjukkan pola hidup rukun dan saling bergantung. Interaksi sosial berlangsung melalui aktivitas ekonomi, Pendidikan, dan budaya sehari-hari.⁴⁶

2.2.1.2. Berdasarkan Agama

Seiring dengan meningkatnya urbanisasi masyarakat ke Kota Makassar dan membuat keberagaman terhadap Suku dan etnis yang menempati wilayah ini, juga berakibat terhadap keberagaman Agama yang dianut oleh masyarakatnya. Berdasarkan data sensus penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 1980, mayoritas penduduk Kota Makassar menganut agama islam yaitu sebanyak 592,679 jiwa. Kemudian penganut agama lain seperti Protestan sebanyak 21,967 jiwa, Katolik 63,883 jiwa, Hindu 2,132 jiwa, Budha 24,016 jiwa, dan agama lainnya sebanyak 3,788 jiwa.⁴⁷

Empat tahun berikutnya pada tahun 1984, keberagaman agama penduduk Kota Makassar mengalami perubahan. Agama mayoritas penduduk masih beragama islam dengan jumlah 632.635 jiwa. Kemudian penganut agama protestan mengalami peningkatan pesat yaitu 64.455 jiwa, dan penganut katolik mengalami penurunan menjadi 24,355 jiwa. Untuk penganut agama hindu tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu sebanyak 2,168 jiwa, begitupun dengan penganut agama budha yaitu



⁴⁶ Taufiq, S. “*Migrasi dan Pemukiman di Kota Ujung Pandang*”. (Jakarta: Relitian Perkotaan, 1980). Hlm. 41-42.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. *Sulawesi Selatan dalam Angka 80*. Hlm. 98.

sebanyak 24,422 jiwa. Adapun penganut agama lainnya seperti agama dari etnis tionghoa dan yang lainnya mengalami penurunan sebanyak 576 jiwa.⁴⁸

Pada tahun-tahun berikutnya, keberagaman Agama penduduk Kota Makassar tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mayoritas penduduknya masih penganut Agama Islam. Meskipun penduduk mayoritas beragama islam, dengan melihat data diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kota Makassar juga menjadi tempat tinggal berbagai komunitas agama lain.

2.2.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Makassar

Pasca Kemerdekaan dengan suasana yang masih panas dan tidak stabil, muncul dua perguruan swasta di Makassar yang mendapat dukungan tokoh masyarakat kaum pejuang kemerdekaan yakni perguruan islam Datu Museng dan Perguruan Nasional pada tahun 1945. Akan tetapi, pemerintah waktu itu yang dalam hal ini pemerintah Negara Indonesia Timur (N.I.T.) tidak memberikan perhatian kepada perguruan ini. Guru-guru yang ada hanya bersifat sukarela daripada seorang guru profesional.⁴⁹

Hingga tahun 1948, kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan hingga masa pemerintahan NIT masih tetap terbelakang dibanding daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Meskipun pemerintah NIT telah mengupayakan untuk memberantas buta huruf namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu bentuk Upaya presiden NIT yaitu Soekawati untuk memberantas buta huruf adalah dengan



Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. *Sulawesi Selatan dalam Angka* 284. Hlm. 262-263.

Sarita Pawiloy, dkk. "*Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*". andang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981). Hlm. 106-108.

membentuk sebuah kepanitiaan yang khusus bertugas untuk memberantas buta huruf tersebut. Kepanitiaan tersebut dinamai Panitia Agoeng Pemberantasan *Boeta Hoeroef*. Presiden Soekawati memberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk segeramembuka kelas-kelas. Sulawesi Selatan menjadi target pertama kemudian disusul daerah-daerah lain. Untuk Sulawesi Selatan dimulai dari Kota Makassar kemudian menyusul Kabupaten Gowa. Dari data statistik tahun 1948, Tingkat buta huruf di Sulawesi Selatan mencapai 90 persen.⁵⁰

Hingga tahun 1950 di Sulawesi Selatan telah terdapat sekitar 980 sekolah rakyat (SR). Perkembangan Pendidikan Tingkat sekolah rakyat pada masa sebelum 1950 cukup menyedihkan. Anak-anak usia sekolah yang mendapatkan akses Pendidikan pada masing-masing kabupaten yang ada hanya mencapai 50 persen dan 50 persennya lagi buta huruf. Selain sekolah rakyat, terdapat pula sekolah menengah umum yang pada umumnya didirikan pada tahun 1950 pada tiap kabupaten. Untuk Kota Makassar sendiri, terdapat dua buah Sekolah Menengah Umum. Terdapat pula sekolah Pendidikan Tingkat SLA yaitu A.M.S. dan H.B.S. masing-masing satu buah. Pada tahun 1950, kedua sekolah lanjutan atas ini mempunyai jumlah murid 720 orang dengan guru sebanyak 70 orang.⁵¹

Pada Tingkat perguruan tinggi sebagai lanjutan SLA, didirikan sebuah Fakultas yakni fakultas ekonomi sebagai cabang dari Universitas Indonesia di



⁵⁰ St. Junaeda. “Menelisik Jejak Pendidikan di Sulawesi Selatan: Dari Sistem an Tradisional hingga Sistem Pendidikan Modern”. *Universitas Negeri* : *Jurnal Rihlah*, Vol. II No. 1. 2014. Hlm. 7-8.

St. Junaeda. “Menelisik Jejak Pendidikan..... hlm. 115-118.

Jakarta pada tahun 1947. Pada bulan oktober 1948, jumlah mahasiswa menjadi 36 orang sedangkan dosen ada 11 orang. Setahun kemudian, oktober 1949 jumlah mahasiswa meningkat lagi menjadi 77 orang. Waktu itu, leergang telah berhasil menamatkan 7 orang dari 8 mahasiswa yang mengikuti ujian akhir.⁵²

2.2.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Makassar

Berbagai etnis yang membentuk kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar yang didominasi oleh etnis pendatang memiliki variasi jenis pekerjaan.⁵³ Orang-orang Makassar dan bugis terutama orang wajo menguasai perdagangan hasil bumi. Orang-orang Mandar selain berdagang kecil-kecilan juga banyak menjadi nelayan. Sedangkan orang Toraja lebih banyak bekerja sebagai agen polisi, pelayan, tukang kayu, pesuruh kantor dan tukang sepatu.⁵⁴

Adapun etnis lain yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti pendatang dari etnis Banjar umumnya sebagai pedagang perhiasan, tukang jahit, pedagang batu permata dan pembuat kopiah. Demikian pula orang minahasa bekerja sebagai aparat pemerintah (pegawai militer), orang-orang Sangir sebagai buruh dan pegawai kecil, orang Ambon sebagai aparat pemerintah dan juga misionaris, orang Timor sebagai buruh, orang Madura sebagai tukang pangkas rambut dan buruh, orang Tanimbar sebagai pegawai dan buruh kecil, orang buton sebagai buruh kasar dari berbagai

⁵² St. Junaeda. "Menelisik Jejak Pendidikan..... hlm. 118-119.



Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota". (Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2010). Hlm. 103.

Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru..... hlm. 102.

laangan pekerjaan seperti pembuatan jalan, dermaga dan bangunan-bangunan. Sementara orang-orang dari Jawa umumnya membuka rumah makan khas Jawa.⁵⁵

Urbanisasi ke Kota Makassar sejak tahun 1945 merupakan contoh proses urbanisasi tanpa industrialisasi atau meningkatnya pergerakan penduduk ke kota yang tidak disebabkan ataupun dibarengi dengan proses pembangunan prasarana ekonomi. Hal tersebut menyebabkan para migran tersebut mayoritas bergerak pada sektor informal. Pada tahun 1970-an, sektor informal di Kota Makassar semakin besar dan terbagi-bagi menjadi pedagang-pedagang kecil yang tersebar di sudut kota. Apabila masih terjadi kelebihan tenaga kerja dan sektor informal ini masih menjadi harapan utama dalam system ekonomi daerah secara keseluruhan serta menjadi tempat para buruh murah menyelamatkan diri agar tidak menjadi pengangguran, maka masyarakat tidak akan terlepas dari jeratan kemiskinan.⁵⁶

Berdasarkan data pada tahun 1983, jumlah pengangguran yang ada di Kota Makassar terbilang cukup banyak. Jumlah pengangguran berdasarkan pencari kerja yang terdaftar mencapai 12,185 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar saat itu sebagai pusat ibu kota masih belum bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam hal prasarana ekonomi.⁵⁷ Hingga pada tahun 1990, Kota Makassar mengalami kemajuan dalam menunjang hal tersebut. Jumlah pencari kerja

⁵⁵ Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru..... hlm. 103-104.



Dias Pradadimara. Dari Makassar..... Hlm. 92-93.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Kotamadya Ujung Pandang dalam tahun 1983*. Hlm. 88.

berdasarkan data yang ada sebanyak 998 jiwa saja.⁵⁸ Tapi dari berkurangnya jumlah pencari kerja, mayoritas penduduk masih bergerak atau berada dalam sektor informal seperti menjadi buruh. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk yang menjadi tenaga produksi dan operator alat angkutan pekerja kasar berjumlah 77,143 jiwa.⁵⁹

2.3.Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Makassar

Pengaruh urbanisasi yang masuk ke Kota Makassar mengakibatkan terjadinya keberagaman dalam etnis, dan keberagaman Agama yang dianut masyarakat. Keberagaman ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat makassar pada masa itu.⁶⁰. Dibeberapa Kawasan, masyarakat hidup berdampingan dengan latar belakang etnis yang berbeda tetapi tetap menunjukkan pola hidup rukun dan saling bergantung. Interaksi sosial berlangsung melalui aktivitas ekonomi, Pendidikan, dan budaya sehari-hari.⁶¹

Hubungan antarumat beragama juga difasilitasi oleh pemahaman atas nilai-nilai kearifan lokal, seperti *sipakatau* dan *sipakainge*’, yang menekankan pentingnya

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Kotamadya Ujung Pandang dalam Angka Tahun 1992*. Hlm. 39.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Kotamadya Ujung Pandang dalam Angka Tahun 1992*. Hlm. 37.

⁶⁰ Mahmud, A. “*Kehidupan Sosial Budaya di Ujung Pandang: Sebuah Sosiologis*”. (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas lin, 1990). Hlm. 45-46.

Taufiq, S. “*Migrasi dan.....*” Hlm. 41-42.



saling menghargai, saling mengingatkan, dan menjaga harmoni.⁶² Dengan demikian, keberagaman agama di Makassar pada 1980-an tidak hanya menjadi ciri demografis semata, melainkan menjadi kekuatan sosial yang membentuk wajah masyarakat kota yang dapat menerima dan menyesuaikan terhadap perbedaan. Nilai-nilai toleransi dan kebersamaan ini menjadi modal sosial penting dalam menghadapi urbanisasi dan modernisasi kota di dekade-dekade berikutnya.⁶³

Tingkat Pendidikan pada masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun struktur sosial dan budaya hidup. Memasuki masa Orde Baru, Tingkat Pendidikan masyarakat Kota Makassar menunjukkan peningkatan sejalan dengan kebijakan Orde Baru yang mendorong pembangunan nasional melalui sektor Pendidikan, seperti penerapan program wajib belajar 6 tahun dan pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah perkotaan. Peningkatan Pendidikan membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang nilai-nilai tradisional. Generasi muda yang mengenyam pendidikan formal mulai menunjukkan kecenderungan berpikir rasional, terbuka terhadap perubahan, dan tidak lagi sepenuhnya terikat pada adat atau struktur sosial lama yang hierarkis.⁶⁴

Kemajuan dalam hal pembangunan kota atau modernitas juga menimbulkan dilema dalam masyarakat. Fenomena ini melahirkan anggapan bahwa bersentuhan

⁶² Daeng, M. *“Nilai-Nilai Lokal dan Toleransi Beragama di Sulawesi Selatan”*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987). Hlm. 37.

⁶³ Rahman, L. *“Pluralisme Sosial dan Dinamika Perkotaan di Indonesia”* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1992). Hlm. 60.

Dias Pradadimara. “Orde Baru dan Kota: Politik Identitas dan Ruang Makassar”. *Universitas Gadjah Mada: Jurnal Populasi, Vol. 14. No. 1.* n. 93.



dengan aspek modern justru memundurkan nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, pada saat restoran maupun nightclub banyak berdiri 1970-an, yang disatu pihak mendorong banyak perempuan untuk bekerja disana sebagai pramusaji hingga pelayan bar, namun dipihak lain, profesi ini dianggap tercela karena umumnya bekerja hingga malam hari, menemani tamu mengobrol, hingga dansa bersama. Hal tersebut menimbulkan permasalahan sosial baru yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat sebelumnya.⁶⁵

Pada masa pemerintahan Walikota patompo, sektor pariwisata dan hiburan mulai di perhatikan. Pada tahun 1980, pembangunan sarana dan prasarana meningkat dengan signifikan. Konsentrasi pusat-pusat perekonomian telah berkembang, salah satunya adalah “Pusat Pertokoan Sombaopu” yang di resmikan tahun 1970. Kebutuhan yang meningkat di dekat laut, menyebabkan sepanjang pantai menjadi pusat hiburan masyarakat Kota Makassar. Di sepanjang jalan tersebut berdiri pertokoan, bar, restoran, hingga klub malam.⁶⁶ Selain itu juga terdapat tempat rekreasi dan hiburan terbesar dalam kota yaitu Taman Hiburan Rakyat (THR). Tempat ini dapat dinikmati bagi semua lapisan masyarakat. Hingga tahun 1975, THR yang terletak di jalan kerung-kerung semakin ramai di kunjungi dan pertunjukan yang disuguhkan pun semakin beragam serta fasilitas yang semakin bertambah.⁶⁷

⁶⁵ Ilham. “Penyeragaman..... Hlm. 23.

Ilham. “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad *urnal Sejarah*, Vol. 1 No.2. 2018. Hlm. 58.

Ilham. Penyeragaman..... Hlm. 20.

